

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2016). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bantul Moenir, H.A.S., (2010), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Bronwen, Golder. (2005). *Cross-Cutting Tool- Stakeholder Analysis*.

Chilmiati, N. (2014). Kebijakan Advokasi terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Jurnal Law Reform*, 9(2), 110-123.

Dewi Indah Susanty dan Nur Juljurniati. (2019) *Domestic Violence Against Women In East Flores*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Emy Rosnawati. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18 No.1 Januari 2018.

Haiyun Nisa. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas, *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.4 No.2, September 2018.

Hasudungan, P., & Alhusna, R. A. F. (2020). Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan. *Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1), 46-54.

Imam Gunawan. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara hlm. 80)

Iskandar, D. J. (2016). Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergulatan Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(3), 461-476.

Kamaruddin, S. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak.

Keban, Yeremias. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media*.

Knight, F. H.. (2002). *Risk, Uncertainty and Profit*. Washington D.C: Beard Books, 224-5

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2019). *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019*.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2020.

Lexy J. Moleong. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 05)

Luthfi J. Kurniawan & Mokhammad Najih. (2008). *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Malang : In Trans Publishing

Mansyur, R. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Mastuti, Sri. (2016). *Mengawal Perkembangan Democratic Governance: Pegangan Para Praktisi Kemitraan Universitas-Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Michael M. Harmon & Richard T. Mayer. (2014). *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*. Kreasi Wacana.

Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muis, I. (2016). Pekerja Sosial dan Pressure Group Dalam Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana. *Proceedings of PISWS. Social Work Across Border*, 303-313.

Musdah, E. (2013). Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(2), 123-136.

Nafisah, S. (2016). Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPT Seruni Kota Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 211-228.

Nana Syaodih Sukmadinata. (2007) *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 72)

Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara (PMN).

Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.

Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Plan International. (2020). *'How are Children Affected by Coronavirus*. Diakses dari <https://plan-international.org/emergencies/covid-19-faqs-girls-women>.

Pratomo, H. (2015). *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 192-200.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahardian, R., & Zarkasi, I. F. (2019). Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Identitas*, 1(2), 26-38.

Rahardjo, T. (2011). Konstruksi teori (komunikasi) dalam logika *hypothetico-deductive*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005). *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Satipsi, E., & Si, S. P. M. (2018) *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ PRESS.

Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ombak.

Sidiq Aulia. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman, *University of Bengkulu Low Journal*, Vol. 4 No.2, Oktober 2019.

Simona-Valeria Toma, at.all. (2012). *Emerging Markets Querie in Finance and Business*, *Procedia Economic and Finance* 3 (2012) 975-980

Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) *Hal 283-393*. Alfabeta.

Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 120-130.

Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112-135.

Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

United Nations Women, (2020) “How COVID-19 Impacts Women And Girls” “ ” diakses dari <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html#portfolioModal1>

Usher, K., Durkin, J., and Bhullar, N., (2020) “The COVID-19 pandemic and mental health impacts,” *Int. J. Ment. Health Nurs.*, vol. 29, no. 3, p. 315.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.

Young, E., & Quinn, L. (2021). *Making research evidence matter: a guide to policy advocacy in transition countries*. Budapest, Hungary: Open Society Foundations; 2012.

#### **UNDANG – UNDANG:**

Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatur tentang layanan P2TP2A.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

**WEBSITE:**

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/03/58065/masa-pandemi-kdrt-di-semarang-hingga-juni-ini-capai-45-kasus>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasanProvinsiJawaTengah>

<https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>

<http://satudata.semarangkota.go.id/>